



Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum, Selama, dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Almas Inka Amiroh¹, Dedek Kustiawati^{2*}, Gustri Sinta Lestari³, Jennifer Theresia Maureen⁴, Zessica Nabilla Ulfa⁵

^{1,2,3,4,5}, Pendidikan Matematika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum, selama dan sesudah pandemi covid-19 di provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Instrumen data dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Hasil dari penelitian yang dikaji menyatakan bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2017 – 2018. Pada tahun 2017 PKB ini mencapai 101%, tahun 2018 adanya suatu peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 102%. Pada tahun 2019 – 2021 persentase pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PKB ini mengalami penurunan sehingga pencapaian yang diperoleh 96,2%, tahun 2020 mengalami penurunan lagi sehingga pencapaian yang diperoleh 88,3% dan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sehingga pencapaian yang diperoleh 75%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu pandemi covid-19.

Kata Kunci: *Studi Pustaka, Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19*

Abstract

The study was intended to know tax revenues of motor vehicles before, during and after the covid-19 pandemic of dki Jakarta in the province. The method used in this study is library research. Data retrieval techniques using books, literature, journals, and reports on the problems to be studied. This research data source is secondary. The instruments of data in this research are library studies. The results of studies studied claim that the percentage of attainment for motor vehicle tax revenues increased by 2017-2018. In 2017 the cia reached 101%, in 2018 there was an increase from the previous year to 102%. By 2019-2022 the percentage of motorized vehicle tax revenues reached a decline. In the second quarter of 2007, bank Indonesia the central bank/bi decided to raise its key rate by 25 basis points to 8.25 percent, he said. This is due to a covid-19 pandemic.

Keywords: *Literature Study, Motor Vehicle Tax, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pendapatan pajak terhadap anggaran pendapatan belanja negara dikatakan signifikan karena memberikan kontribusi sebesar hampir 70%, selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia (Sugianto 2008:1). Begitu pula halnya dengan pembangunan di DKI Jakarta berasal dari pajak pendapatan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam membangun Jakarta ialah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan pajak daerah setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan penggunaan motor di ibukota terus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pun ikut mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 seluruh sektor terdampak terkhusus sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga membuat pajak juga ikut menurun dikarenakan terbatasnya kegiatan masyarakat. Sebab selama pandemi Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sektor pajak termasuk salah satu penghasil pendapatan daerah maupun nasional yang mengalami fluktuasi pada masa covid-19. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Mustaqiem, 2014). Ibukota Indonesia yaitu Jakarta yang juga berperan sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan turut mengalami dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 khususnya terhadap perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan bahwa wabah COVID-19 telah menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta menurun. Pandemi covid-19 mengakibatkan kegiatan perekonomian melambat dan terhambat. Sebab pendapatan utama Jakarta dari pajak, dan pajak mengandalkan kegiatan perekonomian. Ketika kegiatan ekonomi turun, maka pajak yang dibayarkan turun, ketika pajak turun, maka pendapatan Pemprov DKI juga ikut menurun (Online, 2020).

Oleh karena itulah, peneliti ingin membahas mengenai pendapatan pajak sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi mereda terkhusus pada pajak kendaraan bermotor. Sebab kendaraan bermotor di Indonesia menurut sensus BPS menebus angka 133 juta unit pada tahun 2019. Lalu di DKI Jakarta berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) penggunaan sepeda motor di ibukota Jakarta menembus angka 15,8 juta unit pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 16,1 juta unit, dan terus mengalami kenaikan menjadi 16,5 juta unit pada tahun 2021. Besarnya jumlah pengguna sepeda motor secara logika akan berbanding lurus dengan pendapatan pajak. Akan tetapi, apakah dengan adanya wabah covid-19 pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat atau justru mengalami penurunan atau bahkan fluktuasi? Sebab walaupun perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tidak dapat dikatakan secara pasti bahwa pendapatan pajak juga meningkat karena ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pendapatan pajak menurun. Menurut Samudra (2016:93-94) subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Subjek dalam pajak kendaraan bermotor ialah pribadi perorangan atau lembaga yang memiliki kendaraan bermotor. Jika kendaraan bermotor dimiliki oleh lembaga maka kewajiban pembayaran pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor bagi orang yang memiliki kendaraan bermotor.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor baik atas nama pribadi atau lembaga harus sesuai dengan

identitas yang tercantum dalam KTP atau identitas lainnya yang sah di mata hukum.

4. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan oleh pemilik atau kuasa atau ahli warisnya dan jika dimiliki oleh badan/lembaga maka yang bertanggungjawab dalam melakukan pembayaran pajak ialah pengurus atau kuasanya.

METODE

Metode penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research). Studi Pustaka ini adalah pengumpulan suatu informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah, kisah-kisah sejarah dsb (Mardalis:1999). Studi perpustakaan ini mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan suatu landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan studi Pustaka untuk mengetahui pembahasan yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema. Topik ini sesuai dengan tulisan yang akan dibahas oleh peneliti. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Instrumen data dalam penelitian ini adalah studi Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah:

- a. Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat) diantaranya yaitu, Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Masuk, Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya.
- b. Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah) diantaranya Pajak daerah provinsi yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu, Pajak Hotel dan Restaurant (PHR), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Aturan pemerintah yang berkaitan dengan perubahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat dan (ii) Pajak Daerah. Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan, daerah provinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, diantaranya: (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan; dan (4) pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Diantara empat jenis pajak yang ada di DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PAD.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengecekan Pembayaran Sebelum dan Sesudah Pandemi.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, dan digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan. Motor merupakan kendaraan yang paling banyak dimiliki dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kita sebagai pemilik motor diwajibkan membayar pajak, baik itu pajak tahunan maupun pajak lima tahunan. Besaran pajak ini berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan, tahun produksi kendaraan, hingga kapasitas mesin kendaraan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara menghitung pajak motor.

Terdapat Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor dapat kita hitung berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan undang-undang :

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Setelah terjadinya pandemi, undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian terdapat perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor baru untuk menggantikan cara perhitungan pajak sebelumnya:

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{NJKB} \times \text{Koefisien} \times \text{Tarif Pajak}$$

Selain perhitungan pajak kendaraan bermotor, kita harus mengetahui pentingnya melakukan pengecekan pembayaran yang dilakukan untuk melihat pembayaran yang dilakukan individu terhadap

kendaraan bermotornya agar tidak terlambat melakukan pembayaran. Terdapat 2 cara pembayaran yang dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran dan mengecek pembayaran yang kita lakukan, yaitu secara offline/manual dan secara online.

a. Pengecekan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara Offline/Manual.

Mengecek pajak kendaraan dengan cara manual adalah dengan berangkat langsung ke kantor samsat. Untuk melakukan cara ini, maka ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen-dokumen tersebut seperti:

1. Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang asli + hasil fotokopi.
2. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli + foto lembar kesatu BPKB.
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK asli + fotocopy.
4. Sertakan Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor atau PKB yang terakhir.

b. Pengecekan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara Online.

Semakin majunya dunia teknologi kian memicu berbagai sektor, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkannya dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu pula pada bidang pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Dengan adanya sistem pajak online akan memberikan kemudahan dan memberikan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaporkan besaran pajaknya, sehingga potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir, yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. E-Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui transaksi online. Wajib Pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK di Samsat manapun.

Salah satu cara mengecek pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, yakni dengan melalui situs e-Samsat.id. kemudian bisa melalui aplikasi e-samsat yang sebelumnya telah diunduh di ponsel. Dan yang terakhir mengecek pajak kendaraan bermotor secara online dapat dilakukan melalui layanan SMS. Salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sistem pembayaran yang mudah, cepat dan efisien. dengan kehadiran sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sehingga berpengaruh juga dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Data Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum, Saat, dan Sesudah Pandemi

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor				
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Sepeda motor	14.137.126	15.037.359	15.868.191	16.141.380	16.519.197

Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa perkembangan dari jumlah kendaraan bermotor dalam provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adanya peningkatan, karena kendaraan bermotor berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia sudah dianggap sebagai kebutuhan primer bagi penduduk ibukota. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir di DKI Jakarta terus meningkat.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan tiap

tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai 2021 jumlah kendaraan bermotor naik, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 diatas dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap membuat para warga di DKI Jakarta tidak leluasa mengendarai mobil di beberapa kawasan DKI Jakarta setiap harinya. Hal ini membuat banyak warga memilih sepeda motor sebagai moda transportasi utamanya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara signifikan. Walaupun transportasi umum di DKI Jakarta sudah banyak tersedia, tapi nyatanya masih banyak masyarakat ibukota yang beranggapan bahwa kendaraan pribadi jauh lebih efektif dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 yang memuat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta periode 2017 - 2021.

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 – 2021

No.	Tahun PKB	Rencana Penerimaan PKB	Data Penerimaan PKB	%
1.	2017	7.900.000.000.000	7.996.060.000.000	101%
2.	2018	8.350.000.000.000	8.552.500.000.000	102%
3.	2019	8.800.000.000.000	8.844.178.000.000	96,2%
4.	2020	8.843.000.000.000	7.879.223.000.000	88,3%
5.	2021	9.100.000.000.000	6.900.000.000.000	75%

Dari tabel 2 ini terlihat persentase penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta dari tahun 2017 – 2021 tidak stabil karena adanya penurunan persentase. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan 1%, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai rencana penerimaan pajak tetapi samsat DKI berupaya melakukan penagihan kewajiban kepada pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak dengan membuat surat imbauan yang berisikan agar seluruh orang dapat wajib melunasi membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk menunjang kelancaran proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) demi meningkatkan penerimaan Pajak Daerah maka harus diimbangi dengan usaha-usaha yang lebih efisien. Sehingga mendorong pemerintah mengoptimalkan pelayanan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan pada tabel 2 ini terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2020 bahwa Indonesia ini mengalami musibah yaitu Covid-19. Covid-19 adalah suatu masalah yang sangat mengganggu aktivitas pemerintah maupun masyarakat di DKI Jakarta. Pasien covid-19 mengalami peningkatan pada kurun waktu yang singkat, salah satu alasan mengapa terjadi penurunan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikarenakan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan atau bekerja dengan gaji yang dipotong, hal ini sangat berdampak dalam bidang perpajakan khususnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana para wajib pajak tidak akan sanggup membayar kewajibannya sebagaimana mestinya. Otomatis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat

jelas bahwa pandemi covid-19 membawa perubahan yang signifikan yaitu pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19, pajak kendaraan mengalami penurunan dengan selisih yang cukup besar. Meskipun demikian tingkat efisien tetap stabil karena adanya kebijakan pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah hal ini harus di perhatikan dan perlu adanya tindakan lebih baik lagi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.

Kemudian berdasarkan tabel 2, terjadi penurunan kembali pada tahun 2021. Pada saat ini keadaan DKI Jakarta mulai membaik setelah sebelumnya mengalami musibah Covid-19. Meskipun membaik dalam keadaan kesehatan, penurunan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih berlangsung. Karena masyarakat kesulitan mencari pekerjaan setelah sebelumnya dimasa pandemi terdapat PHK dimana-mana, juga para pekerja yang bekerja dengan gaji yang dipotong. Hal ini yang membuat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih mengalami penurunan di tahun 2021 meskipun keadaan telah membaik.

Tabel 3. Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta Tahun 2020

No	Bulan	SAMSAT	SAMSAT	SAMSAT	SAMSAT	SAMSAT	Grand Total
		JAKARTA BARAT	JAKARTA PUSAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR	JAKARTA UTARA	
1.	JANUARI	133,810,91	112,273,49	182,712,60	162,897,20	110,319,16	702,013,39
		5,000	8,600	3,775	8,300	4,590	0,265
2.	FEBRUARI	142,257,16	106,810,63	171,032,63	139,516,54	107,036,25	666,653,24
		4,650	2,775	8,925	9,567	6,928	2,845
3.	MARET	152,500,93	92,856,727,	175,262,40	145,080,91	94,155,219,	659,856,20
		7,200	950	4,600	8,800	441	7,991
4.	APRIL	92,434,852,	79,037,093,	115,424,79	86,825,820,	66,249,132,	439,971,69
		510	500	5,350	400	245	4,005
5.	MEI	99,057,385,	83,429,197,	150,142,68	98,824,677,	70,267,345,	501,721,29
		750	500	4,546	475	843	1,114
6.	JUNI	152,832,25	132,048,67	208,296,59	150,714,54	109,488,11	753,380,18
		5,630	6,151	8,300	3,400	2,134	5,615
7.	JULI	154,327,81	116,057,16	192,087,68	152,185,41	109,888,36	724,546,44
		2,052	3,650	9,400	3,200	6,135	4,437
8.	AGUSTUS	147,657,88	101,547,08	164,118,55	139,642,26	100,870,37	653,836,16
		0,495	8,800	5,100	5,700	0,483	0,578
9.	SEPTEMBER	155,654,57	117,177,18	179,314,82	154,516,23	112,530,39	719,193,21
		5,440	7,300	3,699	4,950	7,490	8,879
10.	OKTOBER	135,458,20	104,737,20	157,689,97	135,154,75	95,852,538,	628,892,67
		8,650	3,550	0,000	1,425	464	2,089
11.	NOVEMBER	157,181,99	118,341,80	186,985,72	157,995,58	107,199,78	727,704,89
		8,650	7,175	7,309	0,475	5,725	9,334
12.	DESEMBER	147,007,70	107,842,79	178,845,26	161,305,88	106,452,43	701,454,07
		4,050	0,000	5,531	2,050	5,685	7,316
Grand Total		1,670,181,690,077	1,272,159,066,951	2,061,913,756,535	1,684,659,845,742	1,190,309,125,163	7,879,223,484,468

Sumber : Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19. Pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 di setiap wilayah bagian DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 1.4. Pada awal terjadi kasus covid pertama di Indonesia pada awal maret lalu ke bulan selanjutnya yaitu bulan april, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pajak kendaraan bermotor pada setiap wilayah bagian dari DKI Jakarta. Secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari total realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar 7.879.223 sedangkan pendapatan pajak pada tahun 2019 sebesar 8.844.178.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dikaji menyatakan bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2017 – 2018. Pada tahun 2017 PKB ini mencapai 101%, tahun 2018 adanya suatu peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 102%. Pada tahun 2019 – 2021 persentase pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PKB ini mengalami penurunan sehingga pencapaian yang diperoleh 96,2%, tahun 2020 mengalami penurunan lagi sehingga pencapaian yang diperoleh 88,3% dan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sehingga pencapaian yang diperoleh 75%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Dev, B. (2021, September 14). Data Penerimaan Pajak Daerah. Diambil kembali dari Bapenda Jakarta: <https://bprd.jakarta.go.id/halaman/data-penerimaan-pajak-daerah>
- Jakarta, B. P. (t.thn.). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021. Diambil kembali dari jakarta.bps.go.id: Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021
- Larashati, N. (2021). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2019 . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Meita Alam, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat). Doctoral Dissertation Universitas Multi Media Nusantara.
- Bintary, Abharina Avidaniar. 2020. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 1 (2): 86–101.
- Kevin F.Tumuli, George M. V. Kawung, and Jaclien I. Sumual. 2021. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 21 (02): 121–29.
- Mariana, Lina, and Yola Miranda. 2021. "Perhitungan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Yamaha Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 1–14. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3400>.
- mengutip, Cara, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Melalui Cukai Kendaraan Bermotor, and Dwiki Ananto Yudo. 2019. "(Cetak) OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DKI JAKARTA MELALUI CUKAI KENDARAAN BERMOTOR" 7 (2): 137–46.
- Mesoino, Grace Carlyn, Amran T Naukoko, and Hanly F Dj Siwu. 2020. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20 (02): 130–41.
- Nim, Arinawati. 2022. "Evaluasi Penerimaan Pajak Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi D.”

- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, Anneke Wangkar, Fakultas Ekonmi, and Jurusan Akuntansi. 2015. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi).” *Berkala Ilmiah Efisiensi* 15 (03): 51–62.
- Seno Sudarmo Hadi, R. D. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *MONETER*, 5(2). Diambil kembali dari <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 149-156.
- Suhendra, Maman, and Rifky Alaf Haykal. 2022. “Tinjauan Pendapatan Perpajakan PPh Pasal 25/29 Pada KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3 (2): 393–401. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1694>.
- Yuyun, Ina, and Rusdi Faizin. 2022. “Analisis Pendapatan Pedagang Ikan Olahan Sebelum Dan Selama Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Kuala Bubon).” *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)* 5 (1): 138. <https://doi.org/10.52434/mja.v5i1.1581>.